

## DAMPAK COVID-19 TERHADAP PERLAMBATAN EKONOMI SEKTOR UMKM

Rais Agil Bahtiar dan Juli Panglima Saragih

19

### Abstrak

*Jumlah kasus Covid-19 yang semakin meningkat melemahkan perekonomian nasional maupun internasional. Berbagai sektor bisnis mengalami perlambatan akibat virus Covid-19. Mulai dari sektor pariwisata, penerbangan, perhotelan, farmasi, alat berat, otomotif, perkebunan hingga pertambangan batubara. Dalam situasi krisis seperti ini, UMKM dapat menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja, penggantian produksi barang konsumsi atau setengah jadi. Tulisan ini mengkaji dampak wabah Covid-19 terhadap perlambatan ekonomi sektor UMKM serta melihat upaya pemerintah dalam memperkuat UMKM. Hal yang terdampak oleh Covid-19 dalam UMKM adalah penyerapan produk, ketersediaan bahan baku, dan proses distribusi. Dalam mengatasi hal ini pemerintah memberikan stimulus yang ditargetkan pada industri pariwisata, penambahan cuti bersama juga dilakukan guna mendorong pariwisata, dan restrukturisasi kredit UMKM, selain itu call center juga disediakan untuk mendengar laporan dan keluhan pelaku UMKM. DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk membangun UMKM di titik-titik bebas Covid-19 dan menjaga daya beli masyarakat untuk menjaga keberlangsungan UMKM.*

### Pendahuluan

Penyebaran virus Covid-19 masih menjadi konsen berbagai negara, terutama yang sudah mengonfirmasi kasus positif terinfeksi di negaranya. Berdasarkan situs *real time Coronavirus COVID-19 Global Cases*, angka terkait kasus ini terus meningkat. Per tanggal 17 Maret, tercatat 188.638 kasus virus Covid-19 merebak di lebih dari 90 negara di dunia. Jumlah kasus tertinggi masih di China, dan diikuti oleh Italia, Iran, Spanyol, dan Korea Selatan ([worldometers.info](http://worldometers.info),

17 Maret 2020). Di Indonesia sendiri jumlah pasien positif terinfeksi Virus Corona (Covid-19) disebut bertambah menjadi 686 orang pada Selasa (24/3). Dari jumlah itu, korban meninggal mencapai 55 orang, dengan jumlah yang sembuh 30 orang. (CNN Indonesia, 24 Maret 2020).

Meskipun angka kesembuhan Covid-19 terus meningkat, kemunculan kasus penyebaran Covid-19 juga mengalami peningkatan sehingga ketidakpastian masih terus memengaruhi laju



perekonomian global. Moody's *Investor Service* memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 akan mengalami perlambatan pada angka 4,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai ini di bawah pertumbuhan tahun 2019 yang berada di angka 5,02%. Perlambatan ekonomi ini diperkirakan akan berlanjut di tahun 2021 meski dengan disertai sedikit penguatan yaitu tumbuh 4,9% saja (tirto.id, 9 Maret 2020).

Dalam situasi krisis seperti ini, sektor UMKM sangat perlu perhatian khusus dari pemerintah karena merupakan penyumbang terbesar terhadap PDB dan dapat menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja, mensubstitusi produksi barang konsumsi atau setengah jadi. Tulisan ini mengkaji dampak perlambatan ekonomi yang muncul karena virus Covid-19 terhadap UMKM serta bagaimana upaya pemerintah dalam memperkuat UMKM dalam rangka mengurangi dampak perlambatan ekonomi virus Covid-19.

### **Dampak Pelambatan Ekonomi Akibat Covid-19 terhadap UMKM**

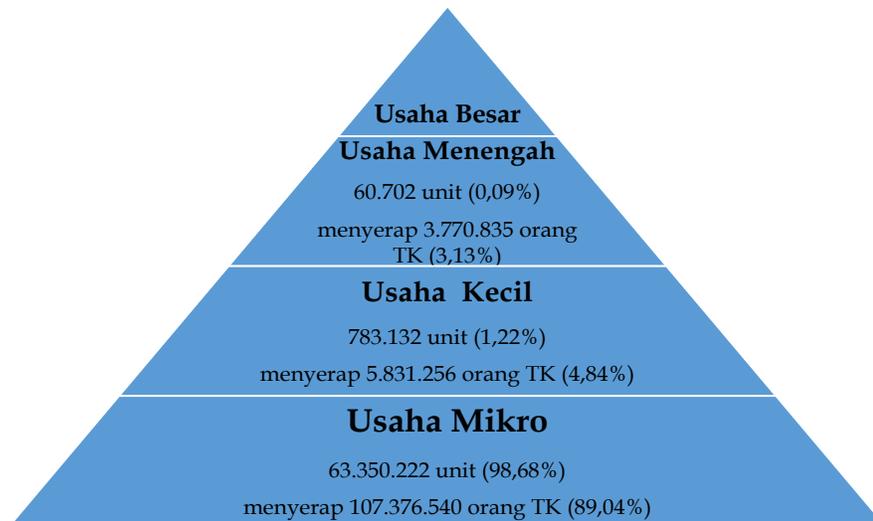
Sejak kemunculannya di akhir tahun 2019, virus Covid-19 telah menyebar di seluruh dunia. Dengan cepatnya penyebaran Covid-19, dampak perlambatan ekonomi global mulai dirasakan di dalam negeri. Mulai dari harga minyak bumi yang jatuh ke arah terendah sejak 1991 pada dua hari lalu, bursa saham yang terjun bebas, serta harga komoditas lain seperti gas dan minyak sawit diperkirakan juga akan tertarik ke bawah apabila

permintaan tidak segera pulih (Kompas, 11 Maret 2020).

Industri pariwisata merupakan salah satu industri yang terdampak oleh penyebaran virus ini. Ketua Bali Tourism Board (BTB)/ Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali, Ida Bagus Agung Partha Adnyana mengatakan telah terjadi 40.000 pembatalan hotel dengan kerugian mencapai Rp1 triliun setiap bulan (Kontan, 5 Maret 2020).

Lesunya sektor pariwisata memiliki efek domino terhadap sektor UMKM. Berdasarkan data yang diolah P2E LIPI, dampak penurunan pariwisata terhadap UMKM yang bergerak dalam usaha makanan dan minuman mikro mencapai 27%. Sedangkan dampak terhadap usaha kecil makanan dan minuman sebesar 1,77%, dan usaha menengah di angka 0,07%. Pengaruh virus Covid-19 terhadap unit kerajinan dari kayu dan rotan, usaha mikro akan berada di angka 17,03%. Untuk usaha kecil di sektor kerajinan kayu dan rotan 1,77% dan usaha menengah 0,01%. Sementara itu, konsumsi rumah tangga juga akan terkoreksi antara 0,5% hingga 0,8% (katadata.co.id, 2 Maret 2020).

Padahal, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia tahun 2018 menunjukkan jumlah unit usaha UMKM 99,9% dari total unit usaha atau 62,9 juta unit. UMKM menyerap 97% dari total penyerapan tenaga kerja, 89% di antaranya ada di sektor mikro, dan menyumbang 60% terhadap produk domestik bruto (Kemenkop dan UMKM, 2018).



**Gambar 1. Kondisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia 2018**

TK: tenaga kerja

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2018

Selama ini UMKM telah membuktikan kemampuannya bertahan dalam situasi ekonomi yang sulit. Sebagian besar UMKM belum berhubungan langsung dengan sektor keuangan domestik, apalagi global. Situasi tersebut menyebabkan UMKM selama ini mampu bertahan terhadap krisis keuangan global seperti pada tahun 1998.

Meskipun telah diketahui ketahanannya dalam menghadapi perlambatan ekonomi, terkait dengan kondisi terkini Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingrabatun memperkirakan omset UMKM di sektor nonkuliner turun 30-35% sejak Covid-19 penyebabnya adalah penjualan produk ini mengandalkan tatap muka atau pertemuan antara penjual dan pembeli secara fisik. UMKM yang menjual produk non-kuliner menyasar wisatawan asing sebagai pasar (Kompas, 10 Maret 2020). Himbauan dari Pemerintah mengenai *social distancing* yang dicanangkan mulai tanggal 15

Maret 2020 juga diprediksi dapat berdampak serius terhadap penyerapan produk UMKM. Maka dari itu, diperlukan perhatian lebih dari pemerintah kepada sektor UMKM sebagai penggerak utama perekonomian bangsa.

### Upaya Pemerintah Memperkuat UMKM

Guna mengatasi lesunya sektor pariwisata, yang memiliki efek besar dalam UMKM, pemerintah berencana menggelontorkan dana sebesar Rp298,5 miliar untuk mendongkrak sektor wisata. Sekitar Rp73 miliar bakal digunakan Kementerian Pariwisata untuk menggandeng sejumlah *influencer* atau pemengaruh asing di media sosial yang bisa mempromosikan Indonesia. Sisanya akan digunakan sebagai insentif maskapai dan agen travel, promosi, serta kegiatan pariwisata (Tempo, 7 Maret 2020). Langkah ini menuai banyak kritik dari masyarakat karena dikhawatirkan bakal membuka pintu penularan Covid-19. Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama

(SKB) tiga menteri No. 174 Tahun 2020 dan No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2020 menambahkan hari libur dan cuti bersama yang semula 20 hari menjadi 24 hari. Penambahan empat hari itu adalah 28 dan 29 Mei sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, 21 Agustus sebagai cuti bersama dalam Tahun Baru Islam, dan 30 Oktober sebagai cuti bersama peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW (Media Indonesia, 10 Maret 2020). Melalui penambahan hari libur nasional diharapkan dapat menjadi stimulus agar usaha pariwisata bisa meningkat.

Pemerintah pada tanggal 14 Maret 2020 mengumumkan paket stimulus untuk menjaga kinerja perekonomian yang tengah tertekan akibat wabah virus Covid-19. Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pada paket stimulus tahap II untuk mengurangi dampak virus Covid-19 ke perekonomian, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp22,9 triliun. Jika ditambahkan dengan alokasi anggaran paket stimulus tahap I untuk industri pariwisata, perumahan dan bansos sebesar Rp10,3 triliun maka keseluruhan anggaran pemerintah untuk meredam dampak Covid-19 sebesar Rp33,2 triliun (kompas.com, 14 Maret 2020).

Dampak wabah virus Covid-19 merembet hampir ke seluruh sektor industri. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun menyatakan, untuk meredam dampak industri Covid-19 lebih luas, perbankan bakal memberikan kemudahan pembayaran utang bagi pengusaha sektor usaha mikro

kecil dan menengah (UMKM). Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, kemudahan tersebut bisa berupa menunda pembayaran pokok utang dengan mendahulukan pembayaran bunga kredit (kompas.com, 14 Maret 2020).

Pemerintah saat ini masih mempelajari bagaimana keadaan UMKM akibat wabah Covid-19. Kementerian Koperasi dan UKM membuka saluran pengaduan (*hotline*) melalui *Call Center* sejak Senin (16/3/2020), pada jam operasional Senin-Jumat, pukul 08.00–15.00 WIB (liputan6.com, 19 Maret 2020). *Call Center* ini ditujukan untuk mengetahui kondisi usaha para Pelaku Koperasi & UMKM yang terdampak wabah Covid-19.

Dari upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah, terlihat masih banyak terpusat pada sektor pariwisata yang memiliki pengaruh besar pada sektor UMKM, selain itu kelonggaran kredit juga dianggap sudah tepat untuk meringankan beban UMKM. Namun, bantuan/insentif kepada UMKM khususnya usaha mikro dan kecil masih perlu diperhatikan apalagi mengingat himbauan *social distancing* saat ini yang berpengaruh besar pada usaha kecil dan mikro yang masih banyak membutuhkan tatap muka.

## Penutup

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait perlambatan ekonomi akibat wabah Covid-19 yaitu dengan memberikan insentif di sektor pariwisata, menambah hari cuti bersama, dan keringanan pembayaran utang bagi pelaku

UMKM. Selain itu, Pemerintah membuka *call center* untuk menerima laporan dan pengaduan dari koperasi dan UMKM yang terdampak wabah Covid-19.

DPR dengan fungsi pengawasannya perlu mendorong pemerintah untuk memanfaatkan keunggulan geografis ini menjadi peluang apabila pemerintah membangun titik-titik UMKM di daerah bebas Covid-19, terutama apabila bertujuan ekspor. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah krisis ini sehingga kemudahan yang diberikan kepada ekonomi dapat terasa manfaatnya. Stimulus tersebut dapat berupa pengurangan tarif listrik dan penurunan harga BBM. ketersediaan bahan produksi seperti bahan baku juga perlu dijamin supaya kegiatan usaha UMKM tidak terganggu secara signifikan dan mampu kembali ke tingkat produksi normalnya secepat mungkin.

### Referensi

"Adu Strategi dan Lentur Menghadapi Kondisi Perekonomian", *Kompas*, 10 Maret 2020, hal. 13.

"Efek Domino Virus Corona ke Industri Penunjang Pariwisata", 2 Maret 2020, <https://katadata.co.id/berita/2020/03/02/efek-domino-virus-corona-ke-industri-penunjang-pariwisata>, diakses 8 Maret 2020.

"Ini Daftar Stimulus Ekonomi untuk Redam Dampak Corona", 14 Maret 2020,

<https://money.kompas.com/read/2020/03/14/094137626/ini-daftar-stimulus-ekonomi-untuk-redam-dampak-corona?page=all>, diakses 15 Maret 2020.

"Kemenkop Catat 21 Koperasi dan UMKM Terdampak Virus Corona", 19 Maret 2020, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4205778/kemenkop-catat-21-koperasi-dan-umkm-terdampak-virus-corona>, diakses 22 Maret 2020.

"Moody's Prediksi Ekonomi Indonesia Melambat di 4,8% Akibat Corona", 9 Maret 2020, <https://tirto.id/moodys-prediksi-ekonomi-indonesia-melambat-di-48-akibat-corona-eDPW>, diakses 9 Maret 2020.

"Paceklik Akibat Covid", 7 Maret 2020, <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/159886/babak-belur-pariwisata-lokal-gara-gara-corona?>, diakses 11 Maret 2020.

"Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017 - 2018", <http://www.depkop.go.id/data-umkm>, diakses 8 Maret 2020.

"Perlakuan Khusus Sementara UMKM", *Kompas*, 11 Maret 2020, hal. 6.

"Terdampak Corona, OJK Izinkan UMKM Tunda Bayar Utang", 14 Maret 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/03/14/064800926/terdampak-corona-ojk-izinkan-umkm-tunda-bayar-utang->, diakses 15 Maret 2020.

"Tingkatkan Laju Ekonomi, Libur Nasional Ditambah", *Media Indonesia*, 10 Maret 2020, hal. 2.

“Update Corona 24 Maret: 686 Kasus, 55 Meninggal, 30 Sembuh”, 24 Maret 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200324114nbv448-20-486374/update-corona-24-maret-686-kasus-55-meninggal-30-semuh>, diakses 24 Maret 2020.

“Virus Korona Bikin Demam Dunia Usaha”, 5 Maret 2020, <https://epaper.kontan.co.id/news/663865/Virus-Korona-Bikin-Demam-Dunia-Usaha>, diakses 8 Maret 2020.



Rais Agil Bahtiar  
[rais.bahtiar@dpr.go.id](mailto:rais.bahtiar@dpr.go.id)



Juli Panglima Saragih  
[juli.saragih@dpr.go.id](mailto:juli.saragih@dpr.go.id)

Rais Agil Bahtiar, menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015 dan langsung melanjutkan pendidikan S2 Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2018 dengan tesis berjudul “Implementasi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (Studi di Kecamatan Purwokerto Utara, Purwokerto Selatan, Purwokerto Timur, dan Purwokerto Barat)”. Saat ini menjabat sebagai Calon Peneliti di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Drs. Juli Panglima Saragih, MM., menyelesaikan pendidikan S1 ilmu Hubungan Internasional di Fakultas FISIP Universitas Negeri Padjadjaran Bandung pada tahun 1988 dan pendidikan S2 Magister Manajemen (MM) Universitas Nusantara Jakarta, tahun 1999. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Bauran Kebijakan MoneterFiskal Terhadap Pencapaian Target Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi (2015), “Kebijakan Subsidi Pupuk dalam Menjaga Ketahanan Pangan, Studi di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Jawa Tengah” (2015), dan “Tantangan Kebijakan Pengembangan Sektor Pertanian di Masa Datang” (2016).

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.